

**IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA
REMAJA DI KAMPUNG KB SUWANDI MANDIRI
KELURAHAN GUNUNG KELUA, KECAMATAN
SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA**

HARIADI

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, 2022**

IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA DI KAMPUNG KB SUWANDI MANDIRI KELURAHAN GUNUNG KELUA, KECAMATAN SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA

Hariadi ¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan yang digunakan adalah melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 247).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari komunikasi atau transmisi yang dilakukan implementor kepada target sasaran berjalan dengan baik. Sumberdaya manusia di Kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri dalam pelaksanaan program BKR sudah memadai. Namun dari segi anggaran, kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri tidak menerimanya secara rutin. Begitu juga dengan sumberdaya fasilitas yang tidak memadai, kegiatan BKR hanya mengandalkan fasilitas yang tersedia saja walaupun tidak memadai. Para implementor khususnya dalam hal ini Kader BKR Kampung KB Suwandi Mandiri mempunyai komitmen, kejujuran dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program BKR. Dalam pelaksanaan Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri kader-kader BKR berpedoman pada Buku Pedoman Pengelolaan BKR yang disusun secara sistematis guna tercapainya tujuan BKR tersebut. Beberapa kendala yang ditemui dalam Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yaitu terkait keterbatasan pelaksanaan kegiatan akibat Pandemi Covid 19, keterbatasan sumberdaya Anggaran dan keterbatasan sumberdaya Fasilitas. Walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu alasan tidak terlaksananya program BKR dengan baik.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, program bina keluarga remaja, kampung KB*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kangmaskasep77@gmail.com

Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa peralihan seseorang dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Masa remaja merupakan tahap kehidupan seseorang yang sangat menentukan bagi kehidupan kedepannya. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dalam buku Pedoman BKR oleh BKKBN (2012: 1) dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia dalam kelompok usia 10–24 tahun ialah sekitar 27,6% atau kurang lebih 64 juta jiwa dari jumlah total penduduk Indonesia. Jumlah yang terbilang cukup besar tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait.

Anak usia remaja dan permasalahannya menjadi isu penting saat ini. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pemahaman dan pengetahuan dari orangtua mengenai remaja itu sendiri. Orangtua dalam hal ini sebagai sosok pendidik pertama di lingkup keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah serta menanggulangi perilaku menyimpang pada anak usia remaja. Remaja yang merupakan generasi penerus bangsa perlu mendapat pembinaan guna mencapai tumbuh kembang remaja secara optimal. Salah satu pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Hadits Riwayat al-Turmuzi: “Tidak ada pemberian orangtua yang paling berharga terhadap anaknya selain budi pekerti yang baik.” Keterampilan orangtua dalam hal memberikan pembinaan kepada anak merupakan kunci keberhasilan untuk membentuk karakter remaja agar mampu mempraktekkan perilaku hidup sehat serta menata kehidupan dengan baik kedepannya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN dalam hal ini sebagai salah satu lembaga non-kementerian merespon permasalahan remaja dan upaya mengatasinya melalui pengembangan Program Generasi Berencana (GenRe). Dijelaskan dalam buku Pedoman BKR oleh BKKBN (2015: 5) Program GenRe dijalankan melalui pendekatan dari dua sisi, yaitu pendekatan kepada anak usia remaja dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki anak usia remaja. Pendekatan kepada anak usia remaja dilakukan dengan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), sedangkan pendekatan kepada keluarga dilakukan dengan program Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).

Bina Keluarga Remaja (BKR) mampu membantu orangtua untuk meningkatkan keterampilan memahami remaja dan permasalahan remaja serta cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR, keluarga yang memiliki anak usia remaja dapat melakukan pertukaran informasi serta berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan remaja, yang meliputi Kebijakan Program GenRe, Penanaman Nilai-nilai Moral Melalui 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS, Keterampilan Hitup, Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender, Komunikasi Efektif Orangtua kepada Remaja, Peran Orangtua dalam membina Tumbuh

Kembang Remaja, Kebersihan dan Kesehatan Diri Remaja, serta Pemenuhan Gizi Remaja.

Sejalan dengan itu, BKKBN memperoleh mandat dalam merealisasikan Agenda Pembangunan Prioritas (Nawacita) dari tahun 2015 hingga 2019, khususnya pada agenda prioritas ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Kawasan Kumuh dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Persatuan”, dan agenda prioritas kelima yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Indonesia”, serta agenda prioritas kedelapan yaitu “Revolusi Karakter Bangsa”. Untuk merealisasikan agenda prioritas tersebut, BKKBN harus mampu melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (dalam Dimensi Pembangunan Nasional) melalui fokus pada Dimensi Pembangunan Kesehatan dan Mental/ Karakter (Revolusi Mental) untuk kemudian diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (Handayani *et al.*, 2020). Dalam penguatan Program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada BKKBN untuk membentuk kegiatan ataupun program yang mampu mengoptimalkan upaya dalam tercapainya target Pembangunan Kependudukan dan Pengendalian Keluarga Berencana 2015-2019, menjadi program tersebut sebagai ikon BKKBN, juga secara langsung meberikan sentuhan serta bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam berbagai tingkatan daerah. Dengan demikian, disepakati bahwa BKKBN kemudian melakukan pembentukan Kampung KB.

Kampung KB merupakan satuan tingkat desa atau sederajat yang mempunyai kriteria tertentu sebagai suatu kesatuan program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara sistematis. Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk melaksanakan kegiatan program prioritas KKBPK secara utuh di lapangan kerja salah satunya Program GenRe itu sendiri. Melalui Kampung KB diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan, akses kesehatan, serta konsep yang dapat dicapai keluarga sejahtera bahagia (Wulantari, 2017).

Kampung KB Suwandi Mandiri, sebagai salah satu Kampung KB di Kota Samarinda yang diresmikan pada tanggal 17 September tahun 2019 lalu. Hj. Sri Hastuti, yang merupakan wakil ketua Kampung KB Suwandi Mandiri menjelaskan bahwa latar belakang dibentuknya kampung KB ini adalah karena sebelum pembentukannya, di wilayah Jalan Suwandi ini sendiri sudah terlebih dahulu melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kampung KB seperti, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan kegiatan tersebut berjalan dengan sangat baik, sehingga pemerintah daerah menjadikannya sebagai Kampung KB Suwandi Mandiri.

Merujuk pada penjelasan mengenai pembentukan Kampung KB Suwandi Mandiri yang mengatakan bahwa sebelum pembentukannya, di wilayah Jalan Suwandi ini sendiri sudah terlebih dahulu melakukan berbagai kegiatan yang

berkaitan dengan kampung KB seperti, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan kegiatan tersebut berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu, peneliti akan menggali mengenai penyelenggaraan terkait kegiatan tersebut khususnya pada kegiatan Bina Keluarga Remaja, yang dimana remaja dan permasalahannya merupakan isu penting saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan publik dalam bentuk Program Bina Keluarga Remaja serta mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri, Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang memiliki angka partisipasi yang masih sangat rendah.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu instrumen pemerintah, tidak hanya dalam arti *government* yang hanya meliputi aparatur negara, kebijakan juga menyangkut *governance* yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan dilihat secara umum merupakan pilihan-pilihan ataupun keputusan keputusan tindakan yang mengatur secara langsung pengelolaan dan juga pendistribusian sumber daya alam, manusia serta finansial demi kepentingan publik yaitu rakyat, penduduk, masyarakat serta warga negara. Kebijakan ialah hasil terjadinya sinergi, komprom bahkan kompetisi antara berbagai macam gagasan, teori, *ideology* serta kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Suharto, 2013: 3). Hal tersebut tidak membenarkan bahwa makna “kebijakan” hanya mengarah atau dominan pada pemerintah saja. Dalam hal ini Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya juga memiliki kebijakan-kebijakan.

Bridgman dan Davis menguraikan kebijakan publik menjadi tiga dimensi yang saling bertautan, yakni 1) Sebagai tujuan (*objective*), dalam hal ini kebijakan publik memiliki arti sebagai serangkaian tindakan dari pemerintah yang disusun guna mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan publik sebagai konstituen pemerintah; 2) Sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), yang artinya kebijakan memiliki sifat legal atau otoritatif karena kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai legitimasi dalam sistem pemerintahan; dan 3) Sebagai hipotesis (*hypothesis*), yang memiliki arti bahwa kebijakan dibuat berdasar kepada teori, model dan hipotesis mengenai sebab serta akibat (Suharto, 2013: 5).

Dengan demikian kebijakan publik merupakan suatu instrumen pemerintah yang pada penelitian ini berwujud kebijakan dalam bentuk Kampung

KB yang dalam hal ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dan juga sebagai salah satu bagian dari usaha pemerintah guna mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkatan daerah terendah melalui program KKBP serta pembangunan pada sektor lain dalam rangka terwujudnya keluarga kecil berkualitas.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap yang bersifat sangat penting dalam berjalannya suatu kebijakan. Menurut Gordon (dalam Mulyadi, 2015:24), mengemukakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang mengarah pada realisasi suatu program. Dalam hal ini pembuat kebijakan mengatur tindakan untuk menginterpretasikan, mengorganisir dan menetapkan kebijakan yang telah melalui tahap seleksi. Implementasi merupakan kegiatan kompleks dengan begitu banyak faktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) mengatakan bahwa terdapat enam faktor yang menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas dari kebijakan tersebut. Kualitas di sini meliputi banyak hal, seperti: kejelasan implementor atau penanggungjawab implementasi, kejelasan tujuan, dan lainnya. Proses perumusan kebijakan sangat menentukan kualitas suatu kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan yang dalam perumusannya dilakukan secara demokratis akan sangat berpeluang menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
2. Kecukupan *input* kebijakan (tercukupinya anggaran). Dalam salah satu kebijakan maupun program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
3. Ketetapan instrumen yang digunakan dalam mencapai tujuan suatu kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya). Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrumen yang tepat. Ketepatan instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).

Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian suatu kebijakan.

Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja atau biasa disebut BKR merupakan suatu program yang strategis yang berupaya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan masyarakat. Program BKR juga diartikan sebagai suatu program yang berupaya dalam peningkatan pengetahuan, sikap serta keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam melakukan pembinaan tumbuh kembang anak usia remaja secara seimbang dengan cara komunikasi efektif antara orangtua dan anak usia remaja. Baik komunikasi fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial serta moral spiritual.

Program kelompok BKR adalah suatu wadah yang memiliki upaya dalam memberikan pemahaman yang tepat terhadap pengetahuan orang tua dalam membina anak usia remaja yang benar. kemudian keluarga remaja merupakan suatu keluarga yang memiliki anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikah. Adapun beberapa tujuan dibentuknya kelompok BKR diantaranya:

1. Meningkatkan segi pengetahuan dari anggota keluarga mengenai keberlangsungan perkembangan anak usia remaja. Diantaranya mengenai pentingnya suatu hubungan bersifat setara serta harmonis dalam keluarga dalam hal membina kepribadian dari anak usia remaja.
2. Menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang orangtua terhadap anak usia remaja, serta sebaliknya. Hal tersebut penting dalam hal menghadapi berbagai masalah yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga menimbulkan rasa menghormati serta saling menghargai satu dengan lainnya.
3. Melaksanakan deteksi dini mengenai setiap gejala yang berkemungkinan menimbulkan kesenjangan hubungan orangtua dengan anak usia remaja di dalam keluarga.
4. Menciptakan wadah hubungan yang harmonis serta sesuai dengan dukungan sikap serta perilaku yang bersifat rasional untuk bertanggung jawab kepada pembinaan proses perkembangan anak usia remaja.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian model kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat terkait sifat-sifat dan fakta-fakta mengenai populasi ataupun objek-objek tertentu (Kriyantono, 2010:69). Hasil penelitian yang akan disajikan dari penelitian ini ialah dalam bentuk data deskriptif, yaitu penjelasan serta penggambaran yang didapat dari hasil penelitian.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Maka peneliti menentukan fokus penelitian pada implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri, yang terdiri dari:

1. Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri, yang meliputi:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
2. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri.

Sumber data atau *Key Informan* yang akan ditemui untuk memperoleh data terkait dengan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Stifani Agustina, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Samarinda Ulu Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, sebagai perwakilan lembaga pemerintah yang menanggulangi dan mengatasi masalah kependudukan yang timbul di masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di kota Samarinda.
2. Hj.Sri Hastuti, Wakil Ketua Kampung KB Suwandi Mandiri.
3. Ulfiatul Nikmah, Ketua Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri.
4. Uemi Chamnah, Bendahara kelompok BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri dan sebagai anggota Kelompok BKR di Kampung KB Suwandi.
5. Nur Dwijati, anggota Kelompok BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber terkait dalam bentuk model interaktif oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Implementasi dari suatu kebijakan ialah tahap pelaksanaan ataupun proses penerapan kebijakan publik yang perlu dipersiapkan secara matang dan terstruktur sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan serta mampu memecahkan kendala yang terdapat dalam masyarakat.

Untuk melihat kelanjutan hasil penelitian tentang Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan demikian penulis melakukan pembahasan hasil penelitian berdasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Komunikasi

Dalam suatu implementasi kebijakan publik, variabel komunikasi memiliki pengaruh yang sangat penting terkait keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan. Jika pelaksana kebijakan mengetahui setiap hal yang harus dilakukan agar suatu kebijakan tersebut mampu ditransmisikan ataupun tersampaikan secara jelas, akurat dan konsisten terhadap kelompok sasaran maka implementasi akan berjalan dengan baik. Dengan demikian untuk melihat proses komunikasi yang terjadi pada Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka penulis telah melakukan wawancara dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Samarinda Ulu Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Ibu Stifani Agustina dan Ibu Ulfiatul Nikmah selaku Ketua Kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri sebagai implementor. kemudian untuk mengetahui perbandingan dengan implementor, wawancara juga dilakukan penulis terhadap kelompok sasaran yaitu Ibu Nur Dwijati selaku anggota kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri.

Berdasar pada perolehan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. Proses komunikasi atau transmisi dalam proses implementasi program BKR yang dilakukan implementor kepada target sasaran berjalan dengan baik karena komunikasi dilakukan secara jelas dengan konsisten. Hal tersebut menyebabkan program BKR tersampaikan dengan baik yang disebabkan oleh terdapatnya sinergitas yang dimiliki implementor dengan anggota kelompok sasaran yang menyebabkan program terlaksana dan tercapai secara maksimal.

Kebijakan akan terlaksana dengan baik jika komunikasi dilakukan secara efektif antara implementor dengan target sasaran. Tujuan serta sasaran suatu program ataupun kebijakan harus tersampaikan dengan baik untuk menghindari terdapatnya distorsi dari kebijakan atau program tersebut. Hal tersebut terbilang penting karena, jika pengetahuan kelompok sasaran semakin tinggi terhadap program ataupun kebijakan maka akan menyebabkan kurangnya kesalahpahaman serta penolakan dalam memahami dan menerapkan program ataupun kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu variabel yang juga bergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu implementasi kebijakan. Dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya tersebut yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya

finansial serta sumberdaya sarana dan prasarana. Peranan penting sumberdaya pada suatu implementasi kebijakan karena walaupun terdapat kejelasan dan konsisten ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, namun dari segi implementor yang kurang mempunyai sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan, maka pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam hal ini yang termasuk sumberdaya manusia ialah staf dengan ukuran yang tepat sesuai keahlian yang dibutuhkan, kemudian kemampuan pelaksana atau dalam hal ini ialah kemampuan sumberdaya anggota akan berpengaruh pada implemmtasi suatu kebijakan. Kemudian sumberdaya finansial juga dibutuhkan dalam hal pembiayaan operasional implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya agar kebijakan yang dilaksanakan berjalan sesuai keinginan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai juga dibutuhkan.

Dari hasil wawancara kepada narasumber yang dilakukan penulis tentang Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri diketahui bahwa dari segi sumberdaya manusia dalam hal ini implementor sudah cukup memadai. Namun jika dilihat dari segi sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas dapat dikatakan belum memadai sehingga hal tersebut menyebabkan implementasi program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri belum optimal. Berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan tidak dapat ditunjang hanya dengan sumberdaya manusia yang memadai, namun perlu ditunjang oleh bentuk sumberdaya lainnya seperti sumberdaya finansial, sarana serta prasarana.

Disposisi

Variabel Disposisi mengarah pada karakteristik implementor yang meliputi kejujuran serta komitmen. Kejujuran memberikan arah kepada implementor agar tetap berada pada arah program yang sebelumnya telah digariskan di dalam guideline suatu program. Kemudian pelaksana yang berkomitmen tinggi serta memiliki kejujuran akan mampu bertahan jika menemukan hambatan dalam program atau kebijakan. Komitmen serta kejujuran mampu membuat implementor semakin antusias melaksanakan proses program dengan konsisten. Dari hasil wawancara kepada narasumber yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi, diketahui bahwa kader-kader kelompok BKR Kampung KB Suwandi mandiri yang bekerjasama dengan dinas terkait berkomitmen, menjunjung kejujuran, serta bertanggungjawab tinggi dalam melaksanakan program BKR.

Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan, struktur birokrasi bersifat penting keberadaannya. *Standard Operational Procedur* (SOP) merupakan salah satu aspek-aspek structural yang paling mendasar dalam suatu organisasi. Dengan adanya SOP, maka para implementor mampu memanfaatkan ketersediaan waktu secara optimal serta SOP berperan dalam menyeragamkan langkah-langkah yang dilakukan pelaksana kebijakan pada organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Dari hasil wawancara kepada narasumber yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa pada Implementasi Program

BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri dilakukan sesuai dengan *Standard Operational Procedur* (SOP) dalam bentuk Buku Pedoman Pengelolaan BKR yang diperoleh dari BKKBN.

Kendala dalam Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri, Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat atau kendala tertentu. Meskipun suatu kebijakan telah diperhitungkan dengan baik, dalam pelaksanaannya akan terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Masalah tersebut bisa berasal dari implementor maupun target sasaran bahkan kondisi secara umum ketika pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara kepada narasumber yang dilakukan penulis terkait Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri, ditemukan beberapa kendala yaitu terkait keterbatasan pelaksanaan kegiatan akibat Pandemi Covid 19, keterbatasan sumberdaya Anggaran dan keterbatasan sumberdaya Fasilitas. Walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu alasan tidak terlaksananya program BKR dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri yang telah dilakukan sebelumnya maka dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari komunikasi atau transmisi yang dilakukan implementor dalam hal ini Kader-kader BKR Kampung KB Suwandi Mandiri kepada target sasaran yaitu anggota kelompok BKR berjalan dengan baik karena komunikasi dilakukan secara jelas dan konsisten sehingga program yang dilaksanakan dapat tersampaikan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.
2. Sumberdaya manusia di Kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri dalam pelaksanaan program BKR sudah memadai, hal tersebut dapat dilihat dari kader-kader yang selalu melakukan pengembangan diri terkait keterampilan dan pengetahuan terkait program BKR itu sendiri. Namun dari segi anggaran, kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri tidak menerimanya secara rutin. Sehingga untuk pendanaan suatu kegiatan yang dilakukan kelompok BKR ini mengandalkan sumbangsi dari kader dan anggota BKR serta menggunakan anggaran umum yang tersedia di Kas Kampung KB Suwandi Mandiri, anggaran dari Kas Kampung KB ini pun sifatnya terbatas karena harus dibagi untuk kelompok lainya. Begitu juga dengan sumberdaya fasilitas yang tidak memadai, kegiatan BKR hanya mengandalkan fasilitas yang tersedia saja walaupun tidak memadai.

3. Para implementor khususnya dalam hal ini Kader BKR Kampung KB Suwandi Mandiri mempunyai komitmen, kejujuran dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program BKR.
4. Dalam pelaksanaan Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri kader-kader BKR berpedoman pada Buku Pedoman Pengelolaan BKR yang disusun secara sistematis guna tercapainya tujuan BKR tersebut.
5. Beberapa kendala yang ditemui dalam Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri yaitu terkait keterbatasan pelaksanaan kegiatan akibat Pandemi Covid 19, keterbatasan sumberdaya Anggaran dan keterbatasan sumberdaya Fasilitas. Walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu alasan tidak terlaksananya program BKR dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung dilapangan yang dilakukan penulis tentang Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri, maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini diperlukan tindakan dari dinas terkait dengan Program BKR agar dapat mengupayakan pelaksanaan kegiatan terkait BKR tetap dilaksanakan guna terus mendukung perkembangan Program BKR.
2. Dalam pelaksanaan Program Pemerintah dibutuhkan sumberdaya anggaran yang memadai, maka dari itu diperlukannya anggaran yang khusus diberikan untuk melaksanakan Program Pemerintah sehingga dapat berjalan secara optimal, mengingat bahwa sumberdaya berupa anggaran tersebut sangat dibutuhkan. Maka sebaiknya Instansi terkait dengan Pemerintah Kota Samarinda, lembaga swasta maupun lembaga-lembaga sosial lainnya melakukan koordinasi agar dapat memberikan pengalokasian dana guna menunjang implementasi suatu Program Pemerintah.
3. Dalam pelaksanaan Program Pemerintah juga dibutuhkannya sumberdaya dalam bentuk sarana serta prasarana atau fasilitas yang mendukung agar dalam pelaksanaan program tersebut dapat terlaksana dengan optimal, oleh karena itu dalam hal ini Kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri sebaiknya meminta pengadaan barang kepada instansi terkait ataupun kepada pemerintan demi menunjang pelaksanaan program dengan efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "Kegiatan Pembinaan Kelompok BKR". Diakses Tanggal 13 April 2021. <<https://kampunqkb.bkkbn.go.id/postSlider/1381/176520>>.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "Profil Kampung KB Suwandi Mandiri". Diakses Tanggal 13 April 2021. <<https://kampunqkb.bkkbn.go.id/profile/2445>>.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "Tentang Kampung KB: Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat". Diakses Tanggal 13 April 2021. <<https://kampunqkb.bkkbn.go.id/about>>.
- Dokumen Buku Pedoman Pengelolaan BKR 2012.
- Dokumen Buku Pedoman Pengelolaan BKR 2015.
- Dokumen Profil Kampung KB Suwandi Mandiri 2019.
- Handayani, Arri, Najib, Sukma Nur Ardini dan Padmi Dhyah Yulianti. 2020. The Evaluation Studies of Kampung KB in Central Java. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan Volume 7 (1)*, hlm 63-73.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Purwanto, Agus E. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Puspitawati, Herien. 2018. *Ekologi Keluarga: Konsep dan Lingkungan Keluarga (Edisi Revisi)*. Bogor: IPB Press.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wulantari, Raden Ayu. 2017. Kampung KB Dalam Bingkai Media: Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kampung KB Selama Tahun 2016. *Demography Journal of Sriwijaya Volume 1 (2)*, hlm 11-16.